

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Sejarah Kementerian Pertanian

Indonesia dan pertanian merupakan sesuatu aspek yang identik. Sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dipengaruhi juga oleh faktor letaknya yang tergolong strategis, hal ini terlihat dari sudut geografis maupun astronomis. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis, sehingga sektor pertanian yang terdiri dari usaha tani, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan menjadi sektor penting bagi perekonomian bangsa. Maka untuk itu bisa dibayangkan tidak mengherankan bila Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris dan mampu 90 % mencapai kebutuhan pangan.

Organisasi pertama yang menangani masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 didirikan sebuah departemen yang memegang bidang di sektor pertanian berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 23 September tahun 1904 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli tahun 1904. Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada saat Indonesia dijajah Belanda dimana urusan pertanian yang dipegang oleh Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel dan Departement van Economische Zaken. Dimana pada masa itu pendudukan Jepang dari mulai tahun 1942 hingga 1945, urusan pertanian ditangani oleh lembaga yang dibentuk oleh Jepang dengan nama *Gunseikanbu sangyobu* dua hari setelah Indonesia merdeka pada tanggal 1 Agustus tahun 1945 presiden pertama Indonesia Presiden Soekarno menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian dibawah control dari kementerian kemakmuran republik Indonesia.

Sejak tanggal 19 Agustus tahun 1945, Pertanian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang pada saat itu adalah kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan dengan Ir. R. P. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Disebabkan situasi Indonesia pada saat itu masih bisa dibayangkan cukup kacau oleh kedatangan tentara Belanda, Kementerian Kemakmuran membuat cabang yang berdiri di Magelang yang

dipimpin oleh R. M. Reksohadiprojo. Departemen Pertanian berubah menjadi Kementerian Pertanian. Setelah terbentuk pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta dan meliputi seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat), tanggal 6 September 1950 terbentuklah Kementerian Pertanian pertama dalam negara kesatuan RI dengan Mr. Tandiono Manu sebagai menterinya. Kementerian Pertanian meliputi jawatan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, dan perikanan pada tanggal 10 Juli tahun 1959, Kementerian Pertanian diubah menjadi Departemen Pertanian. Dibentuk dua unit baru di dalam Departemen Pertanian, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

Di era repelita Departemen Pertanian banyak mengalami kemajuan, salah satunya adalah tercapainya Swasembada beras (1984). Keberhasilan ini didukung karena adanya Program Bimas (Bimbingan Masal) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

- Repelita I (1968 – 1973)
Pada era ini pertanian diarahkan pada kebutuhan pangan terutama beras.
- Repelita II (1973 – 1978)
Mementingkan pembangunan yang berada pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, dan menaikkan pendapatan petani.
- Repelita III (1978 – 1983)
Meningkatkan produksi bahan pangan, ekspor, penghasilan petani serta menciptakan dukungan yang kuat bagi pembangunan industri.
- Repelita IV (1983 – 1988)
Meningkatkan kerja keras petani, pemanfaatan teknologi, penyuluhan yang berkesinambungan, dan kebijakan harga pasar beras.

- Repelita V (1988 – 1993)
Memperbaiki taraf hidup dengan meningkatkan produktivitas pertanian. pada era ini ekspor pertanian meningkat karena komoditas pertanian meningkat.
- Repelita VI (1993 – 1998)
Program pertanian rakyat terpadu di tunjukan untuk membantu petani dalam mengembangkan usahanya dengan pendekatan usaha tani terpadu dimana pilihan komoditinya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia.

Pada 27 oktober 2014 silam menteri pertanian resmi dijabat oleh Amran Sulaiman selama kementerian di jabat oleh Amran Sulaiman, Amran Sulaiman mampu meningkatkan produksi pertanian yang ada di Indonesia peningkatan juga terjadi antara lain seperti peningkatan produksi pangan strategis sehingga indeks impor turun bahkan tidak ada impor padi, cabai, dan bawang merah. Kebijakan tersebut yaitu penyempurnaan regulasi dan penataan Sumber Daya Manusia pertanian dan manajemen.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian

Peraturan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di dalam peraturan tersebut ditetapkan Visi dari Presiden dan Wakil Presiden RI adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk membantu Visi tersebut maka Kementerian pertanian republik Indonesia memiliki visi misi yaitu antara lain:

a. Visi

Visi merupakan pandangan depan dari individu ataupun dari organisasi yang berkaitan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan.

Visi yang digunakan oleh Kementerian pertanian ataupun lembaga yaitu dengan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan memiliki kepribadian Berlandaskan gotong royong". Dengan adanya visi dari pemerintah tersebut dan memperkirakan masalah dan juga tantangan yang di

hadapi dalam pembangunan di sektor pertanian, untuk itu maka dari itu visi Kementerian Pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan adanya peningkatan yang signifikan dari hasil pengembangan penelitian terapan yang didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian di Indonesia.

b. Misi

Secara keseluruhan pengertian dari misi kementan adalah segala sesuatu atau strategi dan juga tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan juga arahan dalam mencapai tujuan pada sebuah organisasi.

Dalam mewujudkan tujuan visi dari Kementerian Pertanian maka visi misinya adalah mampu mewujudkan pertahanan pangan dan juga gizi, meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing komoditas pertanian, mampu terwujudnya kesejahteraan bagi para petani, mampu untuk terwujudnya kementerian pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Adapun jabaran yang ada dari visi misi Kementerian Pertanian, maka adanya tujuan pembangunan pertanian yang ingin di capai seperti misalnya:

- Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
- Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan

Makna dari misi Kementerian Pertanian RI itu sendiri adalah ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang bisa di katakan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian republik Indonesia memiliki tugas yaitu antara lain:

a. Tugas

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki tugas sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian yang bertujuan untuk membantu Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian pertanian jelas dari namanya yaitu bertanggung jawab atas urusan pertanian yang ada di negara Indonesia.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan presiden Kementerian Pertanian menyelenggarakan beberapa fungsi misalnya :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyediaan sarana dan prasarana di kementerian pertanian seperti peningkatan produksi seperti misalnya padi, jagung, dan lain lain demi untuk kesejahteraan sektor pertanian di Indonesia.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
4. menyelenggarakan dan juga melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian yang berada di indonesia.
5. Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
6. Pelaksanaan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
7. Melakukan tambahan yang bersifat substantif yang berada pada unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI.
8. Memberikan pembinaan dan pemberian dukungan kepada administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

9. Melaksanakan ataupun menjaga pengelolaan barang yang dimiliki oleh negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
10. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

2.1.3 Penghargaan dan Pencapaian Kementerian Pertanian Divisi Arsiparis

Kementerian pertanian republik Indonesia memiliki banyak penghargaan karena banyaknya penghargaan yang dimiliki Kementerian Pertanian maka dari itu saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi dari sekian banyak ada beberapa penghargaan yang dimiliki Kementerian Pertanian dan juga piagam yang dimiliki Kementerian Pertanian sub bagian arsiparis yaitu:



Gambar 2. 1 TOP Digital Award
Sumber: www.pertanian.go.id

- Kementerian Pertanian atau Kementan diberikan penghargaan yaitu Top Digital Transformation Readliness pada tahun 2020 pada acara Top Digital Award tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah It Works. Dalam mendapatkan penilaiannya Kementan dinilai berhasil dalam mengimpelemntasikan dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan kepada masyarakat indonesia.
- Selain kementeriannya yang mendapat penghargaan menteri Pertanian yaitu Syahrul Yasin Limpo juga mendapatkan penghargaan sebagai Top Leader on Digital Implementation pada tahun 2020.



Gambar 2. 2 kementerian kategori “BAIK”
Sumber: ruang arsiparis

- Berdasarkan Undang Undang yang membahas tentang kearsipan dan peraturan
- Arsiparis kementerian pertanian mendapat piagam penghargaan dari arsip nasional republik Indonesia sebagai kementerian yang memperoleh kategori baik berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018



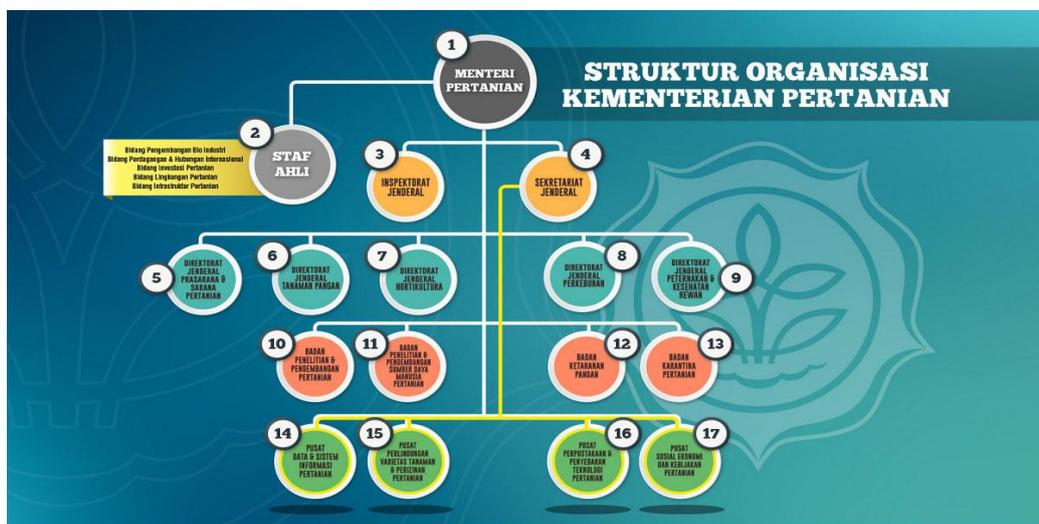
Gambar 2. 3 penyelamatan data arsip penting
Sumber: ruang arsiparis

- Berdasarkan Undang Undang yang tertulis pada Nomer 43 Tahun 2009 yang membahas tentang kearsipan dan peraturan
- Arsiparis kementerian pertanian mendapatkan piagam penghargaan atas peran sertanya dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban Nasional bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan dan hubungan pada setiap bagian atau posisi yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasionalnya yang tentunya untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh kementerian pertanian republik Indonesia akan diperjelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Kementerian Pertanian
sumber: www.pertanian.go.id

Adanya wewenang dan tugas masing masing bagian adalah sebagai berikut:

a) Menteri Pertanian

Tugas dari Menteri pertanian yaitu untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertanian di pemerintahan Indonesia di bidang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan juga mensukseskan visi misi presiden untuk pemerintahan negara Indonesia.

b) Staf Ahli

Staf ahli dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian
- Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian
- Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian
- Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri
- Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional

c) Inspektorat Jendral

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah unsur pengawas pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia sendiri yang berada di bawah tanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

d) Sekretariat jendral

Memiliki mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi yang dilakukan untuk seluruh unit di dalam organisasi lingkungan Kementerian Pertanian.

e) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Memiliki tugas yaitu sebagai penyelenggara perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian di kementerian pertanian.

f) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

g) Direktorat Jenderal Hortikultura

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

h) Direktorat Jenderal Perkebunan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya.

i) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

j) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian. Pada awal berdirinya pada tahun 1974, Badan Litbang Pertanian memiliki 5 Pusat Penelitian Pengembangan (Puslitbang), yaitu Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Tanaman Industri, Puslitbang Kehutanan, Puslitbang Peternakan, dan Puslitbang Perikanan.

k) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian merupakan unsur pendukung untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

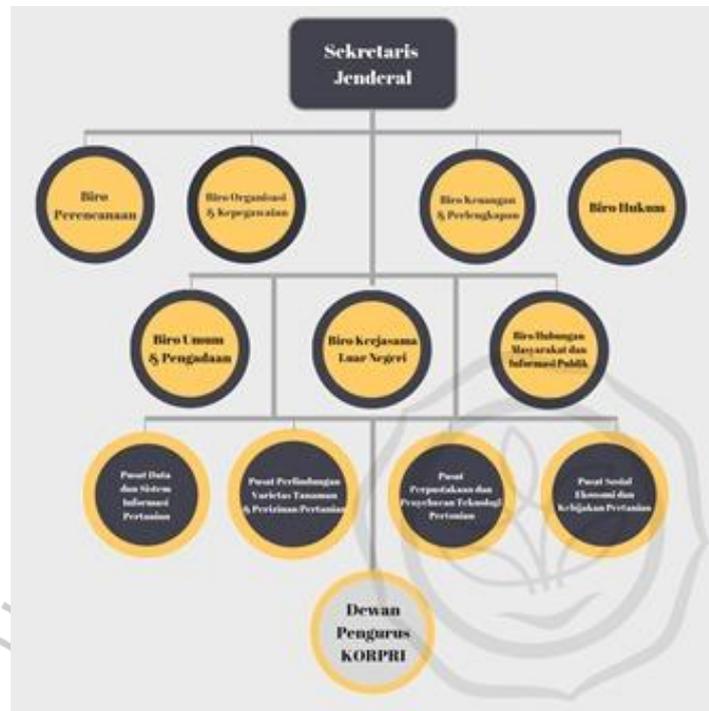
l) Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung bagi Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawaban kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

m) Badan Karantina Pertanian

Barantan atau badan karantina pertanian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

2.2.1 Struktur organisasi sekretaris jendral



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi sekretaris jendral
sumber: www.pertanian.go.id

Sekretariat Jendral memiliki tugas pokok dalam manajemen bertujuan untuk menjalankan tugas ataupun kegiatan Kementerian Pertanian RI, terkhusus bagian kearsipan dimana praktikan menjalankan Kerja Profesi selain itu Sekretariat Jendral juga memiliki bagian seperti misalnya ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan juga layanan pengandaan barang dan jasa. Oleh karena itu untuk menyelesaikan tugas dan fungsi tersebut maka biro umum dan pengadaan mempunyai tugas seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya foto dibawah merupakan struktur dari secretariat Jendral Biro Umum dan Pengadaan:



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan
sumber: www.pertanian.go.id

Struktur organisasi Biro Umum dan Pengadaan sendiri memiliki 3 bagian dan juga memiliki 2 kelompok jabatan fungsional, dari masing masing bagian dan juga masing masing kelompok memiliki tugas , yaitu:

1. Bagian Kearsipan Tata Usaha

Bagian kearsipan tata usaha memiliki tugas yaitu untuk mengelola arsip dan dokumentasi, serta melakukan urusan penerimaan surat masuk maupun surat keluar, juga memiliki tugas mengurus urusan tata usaha Sekretaris Jendral dan staf Ahli.

2. Bagian Layanan Barang dan Jasa

Pada tugas layanan barang dan jasa melakukan urusan pemberian pelayanan administrasi pengadaan barang dan jas, melakukan penyiapan pembinaan, perencanaan, dan juga pemantauan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

3. Bagian Rumah Tangga

Ditugas bagian rumah tangga melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum dan Pengadaan dapat melaksanakan ataupun menyelenggarakan beberapa fungsi seperti:

- Melaksanakan pengelolaan arsip

- Melaksanakan urusan ketatausahaan
- Melaksanakan urusan kerumahtanggaan
- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa
- Pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

2.3 Kegiatan Umum Kementerian Pertanian

Kegiatan utama dari kementerian pertanian antara lain Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian pertanian memiliki program untuk dilaksanakan misalnya seperti Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Program Dukungan Manajemen.



